

Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Melejit Capai Rp1.790.000.000.000



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/30/tahun-2023-bapenda-kotabaru-targetkan-pendapatan-daerah-rp-2-triliun>

Pendapatan daerah Kotabaru, Kalimantan Selatan, melejit hingga Rp1,79 triliun merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah pendapatan di kabupaten Kotabaru. Hal ini dikemukakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Akhmad Rivai, setelah melakukan evaluasi target dan realisasi sumber pendapatan di penghujung tahun 2022. Keberhasilan pencapaian target merupakan wujud kebersamaan dan kekompakan kerja tim personil Bapenda. Selain itu, imbuhnya, juga koordinasi dengan instansi vertikal terkait pemungutan perpajakan daerah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Karantina Pertanian, KPP Pratama Batulicin, dan UPPD Provinsi Kalimantan Selatan. Juga didukung kesadaran masyarakat, dan pelaku usaha yang taat dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak.,

Target pendapatan daerah Kotabaru yang dialokasikan dalam APBD Kotabaru tahun 2022 sebagaimana dialokasikan dalam Peraturan Daerah Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.466 triliun. Selanjutnya, dilakukan perubahan sebagaimana dialokasikan dalam Perda Kotabaru Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022 dengan besar Rp1,754 triliun dan terealisasi pada tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp1.791 triliun lebih atau 102,10%.

Adapun capaian pendapatan daerah tersebut meliputi pendapatan asli daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain. PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp191,7 triliun lebih terealisasi sebesar Rp214 triliun lebih atau naik 111,62%. Dana transfer Pemerintah Pusat seperti DBH, DAU, DAK, DID dan dana desa yang ditargetkan sebesar Rp1.562,528 triliun lebih terealisasi Rp1.577,129 triliun atau 100,93%, dan dana bagi hasil pajak

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditargetkan Rp115,820 triliun terealisasi Rp184,136 triliun lebih atau 158,99%.

Tahun 2023 merupakan tantangan besar bagi sektor pendapatan daerah karena target yang telah dialokasikan dalam APBD sebesar Rp 2 triliun lebih, sehingga Badan Pendapatan Daerah lebih berinovasi dan menggali potensi pendapatan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga terjadi peningkatan optimalisasi pajak daerah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/355578/pendapatan-daerah-kotabaru-melejit-capai-rp-179-triliun>, Pendapatan daerah Kotabaru melejit capai Rp 1,79 Triliun, 30 Desember 2022.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/30/tahun-2023-bapenda-kotabaru-targetkan-pendapatan-daerah-rp-2-triliun>, Tahun 2023 Bapenda Kotabaru Targetkan Pendapatan Daerah Rp 2 Triliun, 30 Desember 2022.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

1. Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.

- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.
2. Program Pembangunan Nasional
 - a. Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
 - b. Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
 - c. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
 - d. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
 - e. RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
 - f. Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
 - g. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
 - h. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 3. Rincian Program Pembangunan
 - a. Kondisi Umum, Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung

lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- b. Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.
4. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025
 - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
 - c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
 - d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan

elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

- e. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- f. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- g. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- h. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- i. Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- j. Kepariwisatahan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisatahan

memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.